RENCANA KINERJA TAHUNAN
BNNP KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah BNNP Kalimantan Tengah yang mengacu pada Rencana Strategi BNN RI 2020 - 2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN RI 5 (lima) tahun ke depan.

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KEPALA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI bekerjasama dengan Puslitdatin BNN RI pada tahun 2019 di Kalimantan Tengah diperoleh angka prevalensi sebesar 0,7% untuk pernah pakai dan 0,4% dan pakai 1 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan provinsi lain, angka ini memang tergolong rendah, namun bukan berarti permasalahan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah tidak perlu ditangani. Saat ini new psychoactive substances (NPS) tercatat mencapai 1.150 NPS di seluruh dunia dan 91 jenis di antaranya beredar di Indonesia. Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan narkotika dikarenakan banyak narkotika jenis baru yang belum diatur oleh undang-undang. Hal ini berarti penanganan masalah narkoba tidak dapat dianggap enteng dan harus diatasi dengan sangat serius.

Peran serta instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terus digerakkan dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari ancaman bahaya narkoba dan memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang peran serta instansi pemerintah, upaya P4GN diimplementasikan oleh *Stakeholder (Pemangku Kebijakan/ Kepentingan)* dalam bentuk anggaran, program dan atau kegiatan yang menjadikan *Stakeholder* tidak hanya sebagai penerima manfaat program (obyek) namun sekaligus sebagai pelaksana (subyek) dalam menciptakan lingkungan kerja maupun masyarakat yang sehat dan terhindar dari aktivitas peredaran gelap Narkoba.

Pembentukan instansi vertikal BNN Provinsi serta BNN Kabupaten/Kota sebagai bentuk untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, yang saat ini bukan hanya

menjadi masalah masyarakat perkotaan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang menyebar ke seluruh pelosok desa di tanah air, karena permasalahan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi vertikal memiliki anggaran operasional yang minim, bila dibandingkan dengan luasnya wilayah operasional (13 Kabupaten dan 1 kota). Saat ini jumlah instansi vertikal BNN Kab/Kota yang terbentuk hingga tahun 2022 baru 2 satuan kerja, hal ini berdampak pada anggaran operasional yang bersumber dari DIPA BNN tiap tahun anggaran dirasakan kurang, oleh karena itu BNNP Kalimantan Tengah membuat Surat Keputusan Pembagian Zona Wilayah yang menjadi tanggung jawab satker BNN Kabupaten/Kota yang terdekat.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

BNNP Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tangan BNN RI dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tengah menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena RKT menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Tahunan menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 dapat menjadi salah satu acuan bagi penyusunan RKAKL tahun 2023.

Pada tahun 2021, BNNP Kalimantan Tengah telah menerima hibah bangunan untuk rawat inap dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun hingga tahun 2022, kegiatan rawat inap belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan SDM yang memadai untuk melakukan rawat inap. Untuk dapat melaksanakan layanan rawat inap yang memadai, BNNP Kalimantan Tengah perlu menyediakan fasilitas dan infrastrukstur seperti ruang pemeriksaan fisik dan kesehatan, ruang asesmen, ruang konseling, dan area bermukim untuk klien rehabilitasi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM rawat inap, BNNP Kalimantan Tengah perlu merekrut dan melatih SDM yang baru agar dapat memberikan layanan sesuai standar.

Permasalahan narkoba yang semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan oleh banyaknya informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di daerah maupun di pedesaaan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kawasan pertambangan dan perkebunan berpengaruh pada masyarakat sekitar dan internal perusahaaan. Ini tentunya akan menambah kawasan rawan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat diperlukan partisipasi dan kepedulian dari masyarakat guna pemulihan kawasan rawan narkoba

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 BNNP Kalimantan Tengah memperhatikan penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2022 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNNP Kalimantan Tengah tahun 2021, serta permasalahan terkini yang dihadapi BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran.

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Kalimantan Tengah sebagai pelayanan publik, secara umum

dapat disimpulkan bahwa BNNP Kalimantan Tengah telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2022 anggaran yang diterima oleh BNNP Kalimantan Tengah dan BNNK jajaran senilai Rp.11.096.690.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.11.009.797.647,- (Sebelas Milyar Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), atau sebesar 99,22%.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

a. Perlunya fasilitas dan infrastrukstur seperti ruang pemeriksaan fisik dan kesehatan, ruang asesmen, ruang konseling, dan area bermukim untuk klien rehabilitasi rawat inap. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM rawat inap, BNNP Kalimantan Tengah perlu merekrut dan melatih SDM yang baru agar dapat memberikan layanan sesuai standar;

b. Meningkatkan bentuk monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja;

c. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN;

d. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba;

e. Dengan mendorong pelaksanaan rencana aksi daerah dalam melaksanakan Inpres 2/2020 pada semua satuan kerja di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdapat beberapa target kinerja BNNP Kalimantan Tengah pada tahun 2022 yang tidak tercapai, namun ada juga beberapa yang melampaui target.

Penentuan target kinerja BNNP Kalimantan Tengah pada tahun 2023 memperhatikan beberapa hal di antaranya :

1) Capaian target kinerja terakhir yang dievaluasi (tahun 2022).
2) Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024.
3) Dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.
4) Hasil Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2022 tanggal 7-8 Maret 2022 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan BNNK Palangka Raya, BNNK Kotawaringin Barat dan usulan dari Bidang dan Bagian di BNNP Kalimantan Tengah.

Usulan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan TA.2023 setiap bidang dibuat dengan memperhatikan poin-poin pada kesimpulan hasil Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2022 tanggal 7-8 Maret 2022 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu Lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.
2) Untuk Optimalisasi Program Desa Bersinar dan Kotan, perlu dukungan regulasi, sistem informasi, blueprint pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.
3) Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.
4) Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.
5) Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada public baik dalam Penyuluhan, Rehabilitasi, Pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.

6) Perlu peralatan pendukung tugas bidang pemberantasan di seluruh BNNP antara lain seperti (Mobile Ex-ray (Seaport); Direction Finder (DF); Celebrite dll)

Rencana Kinerja Tahunan BNNP Kalimantan Tengah berusaha mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan yang telah disusun. Namun, untuk poin 6, setelah dikonsultasikan dengan pembina fungsi di Deputi Pemberantasan Direktorat Intelijen BNN RI didapatkan informasi bahwa pada tahun 2023 akan melakukan pengadaan alat tersebut bagi BNNP di 34 provinsi sehingga BNNP Kalimantan Tengah tidak menganggarkan peralatan tersebut.

Kebutuhan pendanaan BNNP Kalimantan Tengah beserta jajaran untuk tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Pendanaan BNNP Kalteng dan Jajaran Tahun 2023

NO	KODE OUTPUT	KEGIATAN	BNNP KALTENG	BNNK PALANGKA RAYA	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN
1	5936	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	120,000,000	65,000,000	65,000,000	250,000,000
2	3247	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	110,000,000	100,000,000	100,000,000	310,000,000
3	3257	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	243,782,000	216,970,000	216,970,000	677,722,000
4	3248	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	112,000,000	-	-	112,000,000
5	3259	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	221,183,000	11,125,000	9,975,000	242,283,000
6	3260	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	409,846,000	119,216,000	132,835,000	661,897,000
7	3256	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	54,350,000	13,110,000	8,230,000	75,690,000
8	3251	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	100,000,000	-	-	100,000,000
9	5354	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	650,000,000	50,000,000	50,000,000	750,000,000
10	3258	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	203,955,000	39,250,000	-	243,205,000
11	3236	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	3,695,793,000	94,870,000	114,458,000	3,905,121,000
12	3237	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	45,960,000	19,552,000	19,088,000	84,600,000
13	3238	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	67,786,000	13,400,000	35,142,000	116,328,000
14	3239	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	2,198,762,000	1,186,783,000	960,049,000	4,345,594,000
15	3979	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	45,200,000	20,000,000	20,000,000	85,200,000
		TOTAL	**8,278,617,000**	**1,949,276,000**	**1,731,747,000**	**11,959,640,000**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Rp.250.000.000,-
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Rp.310.000.000,-
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Rp.677.722.000,-
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Rp.112.000.000,-
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,97	
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Rp.242.283.000,-
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2	Rp.661.897.000,-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	2	
		Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,4	
7.	Meningkatnya pengungkapan tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan	10	Rp.750.000.000,-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	prekursor narkotika yang P-21		
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	
8.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp243.205.000,-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
9.	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	
10.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	Rp.116.328.000,-
		Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	96	Rp.8.420.515.000,-
		Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	1 lembaga
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	20 orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok eMasyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	10 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	5 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	11 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	2 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	3 Lembaga
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2 laporan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	10 Berkas Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	10 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan
			Layanan Perkantoran	12 Bulan